

ANALISIS *BEST PRACTICE* PADA IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI SMA NEGERI SUMATERA SELATAN

Dea Nofitri, Nina Widowati

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The free education program at SMA Negeri Sumatera Selatan is an initiative of the Government of South Sumatra Province aimed at expanding access to internationally oriented quality secondary education for high-achieving students from underprivileged families as part of efforts to improve the quality of educational services and alleviate poverty. This study aims to analyze best practices, which include impact, partnership, sustainability, leadership, and transferability, as well as the supporting factors for the successful implementation of the free education program based on the policy implementation model proposed by George C. Edwards III, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative approach using purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were validated using source, and technique triangulation. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the free education program at SMA Negeri Sumatera Selatan meets the criteria of best practice through its impact on improving the quality of education and access for underprivileged families, partnerships involving government, academic institutions, and private sector, the sustainability of program development, delegative leadership, and its transferability to other regions. The supporting factors for the successful implementation of the program include clear, consistent, and continuous policy communication; the availability of competent human resources; adequate and sustainable budget support; and supportive facilities and infrastructure. In addition, the commitment of policy implementers and a well-structured bureaucratic system with clear division of authority and effective coordination also contribute to the program's success. This study recommends that the Government of South Sumatra Province continue implementing and developing the free education program as a strategic public policy instrument to improve the quality of human resources and as a sustainable model for the implementation of free education policies.

Keywords: *Best Practice, Free education, Supporting Factors, SMA Negeri Sumatera Selatan.*

ABSTRAK

Program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan memperluas akses pendidikan menengah berkualitas dan bertaraf internasional bagi peserta didik berprestasi dari keluarga pra-sejahtera sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik terbaik (*best practice*) program pendidikan gratis meliputi dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas serta faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis menurut Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta divalidasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan telah memenuhi kriteria *best practice* melalui dampak terhadap kualitas pendidikan dan akses bagi keluarga prasejahtera, kemitraan dari peran pemerintah, akademisi, dan swasta, keberlanjutan pengembangan program, kepemimpinan delegatif, dan transferabilitas ke daerah lain. Faktor pendukung keberhasilan implementasi program pendidikan gratis didukung oleh komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan berkesinambungan; ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten; dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan; serta sarana dan prasarana yang menunjang. Selain itu, komitmen pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang tertata dengan pembagian kewenangan dan koordinasi yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus mengimplementasikan dan mengembangkan program pendidikan gratis sebagai instrumen kebijakan publik strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dapat dijadikan model implementasi kebijakan pendidikan gratis yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Best Practice*, Faktor Pendukung, Pendidikan gratis, SMA Negeri Sumatera Selatan

PENDAHULUAN

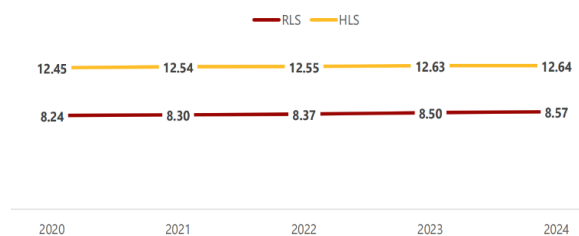
Pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara bagi untuk mengakses layanan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin (Saraswati dalam Suardi et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak warga untuk memperoleh pendidikan.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya. Berdasarkan data Worldtop20.org tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-67 dari 209 negara dalam kualitas pendidikan. Faktor pembiayaan sering menjadi hambatan utama bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga memicu meningkatnya jumlah anak yang tidak bersekolah. Anak Tidak Sekolah (ATS) merujuk pada kelompok usia 7–18 tahun yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, atau belum pernah mengenyam pendidikan formal akibat faktor sosial ekonomi maupun kesiapan individu dalam mengikuti proses pembelajaran (Rinaldi et al., 2021).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan menunjukkan bahwa

APK pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu sebesar 70,80 persen. Rendahnya partisipasi pendidikan pada tingkat SLTA di wilayah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat, nilai budaya, keterbatasan daya tampung sekolah, serta lingkungan sekitar.

Gambar 1. 1 Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 1.1 menunjukkan Provinsi Sumatera Selatan masih perlu meningkatkan kualitas pendidikan, terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang baru mencapai 8,57 tahun, artinya sebagian besar penduduk dewasa (25 tahun ke atas) hanya menempuh pendidikan hingga kelas VIII atau IX SMP. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target wajib belajar 12 tahun.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan melalui pendirian sekolah berasrama bertaraf internasional, yaitu SMAN Sumatera Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai

Sampoerna Academy. Sekolah ini didirikan pada tahun 2009 melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Putera Sampoerna Foundation untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan berkualitas bertaraf internasional, terutama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga pra-sejahtera.

SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan salah satu bentuk intervensi kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan menengah bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program pendidikan gratis dirancang sebagai kebijakan strategis untuk menjawab dua tantangan utama daerah, yaitu belum optimalnya kualitas layanan pendidikan dan tingginya angka kemiskinan. Kebijakan ini sejalan dengan Misi pertama Gubernur Sumatera Selatan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompetitif. Program pendidikan gratis ditetapkan sebagai salah satu dari dua belas program prioritas daerah, khususnya sebagai program strategis keempat dalam agenda pendidikan yang berkeadilan.

SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan salah satu sekolah unggul yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan

berbasis asrama (*boarding school*). Sekolah ini dikenal luas sebagai salah satu SMA terbaik di wilayah Sumatera Selatan karena konsistensinya dalam mencetak prestasi akademik maupun nonakademik pada tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Tabel 1. 1 Prestasi SMA Negeri Sumatera Selatan

No	Prestasi	Tingkat
1.	Bridge GEDSI School Model Australia-Indonesia	Internasional
2.	Peringkat 119 Nasional nilai UTBK Tertinggi se-Indonesia	Nasional
3.	Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kemendikbudristek	Nasional
4.	Penerima Penghargaan Apresiasi TERBAIK Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI	Nasional
5.	Sekolah Teraktif Tantangan Sepekan Satu Buku-Perpustakaan Nasional	Nasional
6.	Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan XIII, DITJEN GTK Kemendikbud RI	Nasional
7.	Juara 1 Best School Appreciation oleh Astra Honda Motor	Nasional
8.	Juara II Lomba Perpustakaan Terbaik	Provinsi
9.	Juara 1 Lomba Optimalisasi Teknologi sebagai Upaya menuju Digitalisasi Pendidikan oleh PT. Quipper Edukasi Indonesia	Provinsi

Sumber: Instagram @smansumsel

Secara khusus, pada tahun 2022 SMA Negeri Sumatera Selatan berhasil menempati peringkat ke-119 secara nasional dalam perolehan nilai UTBK tertinggi se-Indonesia dan masuk dalam daftar Top 1000 sekolah terbaik nasional berdasarkan hasil UTBK tahun 2022 (Kompas.com, 2023). Selain capaian akademik tersebut, SMA Negeri Sumatera Selatan juga dipercaya sebagai Sekolah Penggerak Angkatan 2 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta terpilih sebagai bagian dari program *Bridge GEDSI School Model Australia-Indonesia*.

Setiap tahun, SMA Negeri Sumatera Selatan membuka kesempatan bagi lulusan SMP/MTs berprestasi untuk mengikuti proses seleksi penerimaan peserta didik baru.

Tabel 1. 1 Total Siswa SMA Negeri Sumatera Selatan

Tahun	Kuota Siswa
2021	100
2022	100
2023	115
2024	120
2025	125

Sumber: Website PPDB SMAN Sumsel diakses pada Juni 2025

Sejak berdirinya pada tahun 2009 hingga 2024 telah membuktikan komitmennya dalam mencetak lulusan berkualitas dengan keberhasilan lebih dari 1.300 alumni yang melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun luar negeri.

Gambar 1. 2 Sebaran Jenis Perguruan Tinggi Alumni



Sumber: SMA Negeri Sumatera Selatan, 2025

Tabel 1. 3 Data Sebaran Alumni

No	Keterangan	TAHUN LULUS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PERGURUAN TINGGI NEGERI	63	61	66	79	79
2	PERGURUAN TINGGI SWASTA	31	37	29	17	16
3	MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI LUAR NEGERI	0	1	1	0	2
4	SEKOLAH KEDINASAN	2	0	2	1	2
5	PESANTREN	0	0	1	0	0
JUMLAH ALUMNI		101	101	99	100	100
JUMLAH MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI		100	99	99	96	99
LANJUT KULIAH DENGAN BEASISWA		96	97	97	95	95
LANJUT KULIAH TANPA BEASISWA		4	2	2	1	4
LANJUT BEKERJA/GAPYEAR		1	2	0	4	1

Sumber: SMA Negeri Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 sebagian besar dari Siswa SMAN Sumatera Selatan meraih kesempatan kuliah dengan beasiswa penuh. Keberhasilan para alumni ini tidak lepas dari kualitas pendidikan, pembinaan intensif, dan dukungan sistem yang diterapkan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Keberadaan program pendidikan gratis memberikan kontribusi nyata dalam meringankan beban orang tua peserta didik, khususnya mereka yang berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai variabel yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam proses implementasinya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan ditinjau dari aspek *Best Practice*? Serta apa saja faktor-faktor pendukung keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan?

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Aminuddin Bakry (2010) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk keputusan yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan serta distribusi sumber daya, baik sumber daya alam, keuangan, maupun sumber daya manusia, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nugroho dalam Wahab (2012:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menempati posisi krusial dalam siklus kebijakan publik, karena kebijakan yang telah diformulasikan tidak akan menghasilkan perubahan apabila tidak diwujudkan secara tepat dalam praktik (Rodiyah et al., 2022).

Van Meter dan Van Horn (dalam Najikhah et al., 2021) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun pihak nonpemerintah untuk merealisasikan sasaran kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagaimana dikutip dalam Syahrudin

(2018), tahap implementasi memegang peranan yang sangat krusial dalam keberhasilan kebijakan publik. Subarsono (2011:90) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor kunci, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.

Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pihak pengirim kepada pihak penerima. Dalam konteks implementasi kebijakan, penyampaian informasi bertujuan agar para pelaksana kebijakan memahami secara jelas hal-hal yang perlu dipersiapkan serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

2) Sumber Daya

Edward III sebagaimana dikutip dalam Syahrudin (2018:60–61) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Keberhasilan pengelolaan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa

unsur utama, antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

3) Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan di mana para pelaksana memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan kebijakan secara profesional, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau bias tertentu.

4) Struktur Birokrasi

Dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi dituntut untuk mampu mendukung keputusan politik melalui mekanisme koordinasi yang efektif dan terarah (Syahrudin, 2018:63).

Best Practice (Praktek Terbaik)

Menurut UN-Habitat (dalam Prasojo et al., 2004) suatu praktik dapat dikategorikan sebagai *best practice* apabila memenuhi beberapa karakteristik utama, yaitu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terbentuk melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta memiliki keberlanjutan dalam dimensi sosial,

ekonomi, budaya, maupun lingkungan sehingga *best practice* tidak hanya berfokus pada keberhasilan jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan suatu program untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Perspektif *Best Practice* dapat membantu dalam mengidentifikasi praktik implementasi program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan. Kriteria penilaian *Best Practice* menurut Eko, Prasojo. et.all. (2004) terdiri dari:

1. Dampak (*impact*)

Kemampuan program dalam memberikan perubahan positif yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi. Dalam bukunya Prasojo (2007) mengatakan bahwa dampak yang bisa dilihat pada dimensi dampak yaitu dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing.

2. Kemitraan (*partnership*)

Implementasi *best practice* yang efektif menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan kerja sama antar aktor. Prasojo (2007) menjelaskan bahwa pada dimensi kemitraan dilihat dari jumlah stakeholder yang berpartisipasi dan peran atau urgensinya dalam penerapan program.

3. Keberlanjutan (*sustainability*)

Kemampuan program untuk memberikan manfaat jangka panjang. Dalam bukunya Prasojo (2007) menjelaskan bahwa dalam dimensi ini, indikator yang digunakan yaitu peraturan atau legislasi yang mendukung keberlanjutan program dan dukungan secara berkelanjutan.

4. Kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan berperan dalam mendorong terjadinya perubahan melalui komitmen dan visi strategis sehingga mampu menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap inovasi serta mendorong implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Transferabilitas (*transferability*)

Kemampuan suatu program untuk diadaptasi dan diterapkan di konteks lain diharapkan dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) bagi wilayah lain. Dalam bukunya prasojo (2007) menjelaskan bahwa dalam dimensi ini indikator yang dipakai berupa transfer di tempat lain, adopsi pengetahuan/sistem dan adopsi informasi/teknologi, dengan sub indikator berupa kemudahan penerapan program dan fisibilitas untuk diterapkan di tempat lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk

menganalisis *Best Practice* program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan program. Situs Penelitian dilakukan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Sarana Prasarana, Kurikulum, P2M, dan kesiswaan, serta Guru dan Orang Tua Peserta Didik.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara, serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet, dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi dengan analisis kualitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Best Practice Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan

Best practice menjadi relevan sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana implementasi program pendidikan

gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat atau sasaran program. Menurut UN Habitat (dalam Eko, Prasoj. *et.all* 2004) kriteria penilaian *best practice* terdiri dari, yaitu Dampak, kemitraan keberlanjutan, kepemimpinan, dan dapat ditransfer.

a. Dampak (*impact*)

Dampak merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu *best practice*, karena praktik yang baik harus mampu memberikan perubahan nyata terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Program Pendidikan Gratis berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan dukungan komprehensif bagi siswa yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses akibat kondisi ekonomi.

Gambar 3.1 SPMB SMAN Sumatera Selatan



Sumber: Humas SMA Negeri Sumatera Selatan, 2026

Berdasarkan Gambar 3.1 Setiap tahun SMA Negeri Sumatera Selatan menerima sekitar 100–120 peserta didik yang berasal dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sistem seleksi yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa siswa yang diterima merupakan peserta didik berpotensi yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Dampak yang dihasilkan tidak hanya terlihat pada peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah, tetapi juga pada perubahan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh peserta didik dan keluarganya.

Dampak program juga dirasakan langsung oleh keluarga peserta didik. Orang tua siswa menyatakan bahwa program ini membuka akses terhadap pendidikan berkualitas yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya dukungan pembiayaan dan beasiswa penuh selama tiga tahun penuh, keluarga tidak lagi terbebani oleh biaya pendidikan sehingga siswa dapat fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan prestasi.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini juga terlihat dari meningkatnya jumlah lulusan yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan berbagai skema

beasiswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pendidikan gratis memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Gambar 3.2 Rekapitulasi Siswa Lulus Perguruan Tinggi

REKAPITULASI PROGRAM "PATHWAY TO UNIVERSITY" 14th INTAKE - 4 Juni 2025			
WUR, BELANDA	1 SISWA	UNIVERSITAS INDONESIA	2 SISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	4 SISWA	UNIVERSITAS GADJAH MADA	1 SISWA
UNIVERSITAS PADJADJARAN	4 SISWA	UNIV. NEGERI YOGYAKARTA	1 SISWA
UNIVERSITAS AIRLANGGA	7 SISWA	UNIVERSITAS MALANG	1 SISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR	6 SISWA	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	1 SISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	2 SISWA	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	1 SISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO	2 SISWA	PPM SCHOOL OF MANAGEMENT	1 SISWA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	2 SISWA	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	1 SISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	6 SISWA	UNIV. VETERAN YOGYAKARTA	1 SISWA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA	17 SISWA	UNIVERSITAS JEMBER	1 SISWA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG	5 SISWA	SAMPOERNA UNIVERSITY	1 SISWA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA	5 SISWA	UIN UMAM BONJOL PADANG	1 SISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	3 SISWA	UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK	1 SISWA
UNIVERSITAS LAMPUNG	2 SISWA	UNIV. MULTIMEDIA NUSANTARA	4 SISWA

Sumber: Instagram @smansumsel, 2026

Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan memberikan dampak positif yang nyata, baik terhadap peningkatan kualitas pendidikan maupun terhadap kondisi kehidupan Masyarakat dalam membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera untuk melanjutkan perguruan tinggi serta mendorong mobilitas sosial.

b. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan dalam pelaksanaan suatu *best practice* tidak hanya ditentukan oleh satu aktor, melainkan oleh sinergi berbagai

pihak yang memiliki kepentingan terhadap tujuan yang sama.

Pelaksanaan program pendidikan gratis tidak hanya didukung oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai mitra eksternal seperti lembaga pendidikan, institusi keuangan, perusahaan swasta, serta organisasi lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan.

Kemitraan yang terbangun tidak hanya berbentuk dukungan finansial atau fasilitas, tetapi juga mencakup kegiatan pengembangan kapasitas siswa seperti pelatihan, pembinaan karakter, serta penguatan keterampilan. Dukungan dari mitra eksternal membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan inovatif.

Selain itu, keberhasilan kemitraan juga ditentukan oleh adanya pembagian peran yang jelas antar stakeholder. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan regulasi serta dukungan pembiayaan program, sementara sekolah bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis dan pengelolaan kegiatan pendidikan. Sementara itu, mitra eksternal memberikan dukungan tambahan dalam pengembangan program dan peningkatan kualitas pendidikan.

c. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan didukung oleh dua faktor utama, yaitu dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pengembangan program secara berkelanjutan oleh pihak sekolah. Program pendidikan gratis telah berjalan sejak tahun 2019 dan hingga saat ini masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Selain dukungan kebijakan, keberlanjutan program juga ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam melakukan inovasi dan pengembangan program secara adaptif seperti pembinaan karakter, pengembangan kepemimpinan siswa, serta peningkatan kualitas pembelajaran agar program tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan dunia pendidikan.

d. Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan dalam Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan terlihat dari komitmen pimpinan daerah serta kepemimpinan transformasional di tingkat sekolah. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah, program ini tetap dipertahankan sebagai prioritas kebijakan pendidikan.

Di tingkat sekolah, kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam memastikan program berjalan secara efektif. Kepemimpinan yang kuat juga tercermin dari berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima oleh pimpinan sekolah sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam pengembangan pendidikan. Dilansir dari Instagram @smansumsel Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan telah berhasil mendapatkan penghargaan Profesor Mahyuddin Award Tahun 2025 kategori Guru. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata atas dedikasi, integritas, serta pengabdianya dalam memajukan dunia pendidikan dan membentuk generasi muda yang berkarakter, berilmu, serta menjunjung tinggi nilai kebenaran.

e. Transferabilitas (*Transferability*)

Praktik yang baik memiliki potensi untuk direplikasi atau dijadikan rujukan oleh institusi lain. Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan menunjukkan karakteristik transferabilitas melalui kegiatan berbagi pengalaman dan praktik implementasi kepada berbagai pihak, banyaknya sekolah dan pemerintah daerah lain yang mereplikasi, melakukan penelitian, dan studi banding, baik dari dalam maupun luar Pulau Sumatera.

Tabel 3.1 Data Kegiatan Studi Tiru SMA Negeri Sumatera Selatan

Nama Instansi	Kegiatan
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Studi Tiru Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan
SMAN Sumatera Selatan	Berbagi Praktik Baik Sekolah Penggerak Angkatan 2
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan	Pelatihan Kehumasan Keterbukaan Informasi Publik
Badan Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta	Kunjungan dan Transferabilitas Mutu Pendidikan Sekolah
SMAN 8 Palembang	Kunjungan Studi
SMAN 1 Sirih Pulau Padang	Kunjungan Studi
SMAN 4 Sekayu	Studi Tiru Perencanaan Berbasis Data
SMAN 5 Bengkulu, SMAN 3 Banyuasin, SMAN 1 Belimbang, SMAN 2 Prabumulih	Studi Tiru Program Sekolah Penggerak
SMA Negeri Rupit	Studi Tiru Implementasi Kurikulum Merdeka

Sumber: Humas SMA Negeri Sumatera Selatan

Berdasarkan Tabel 3.1 Kunjungan dari berbagai lembaga pemerintahan, sekolah, serta organisasi pendidikan menandakan bahwa program ini telah memperoleh pengakuan sebagai model pengelolaan pendidikan yang efektif dan memperkuat posisi sekolah sebagai pusat pembelajaran praktik kebijakan pendidikan gratis.

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan

Menurut Edward III faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan dari yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam proses implementasi kebijakan melibatkan sejumlah dimensi utama, yaitu penyampaian informasi (*transmission*),

kejelasan pesan (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*).

1) Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan dinilai telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pemahaman yang sama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pihak sekolah, serta calon penerima manfaat mengenai tujuan program, sasaran kebijakan, dan mekanisme pelaksanaannya.

Desain dan substansi program disampaikan secara sistematis dan dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Program-program seperti *foundation study*, kehidupan berasma, serta pembinaan disiplin dan spiritual dirancang dan diimplementasikan berdasarkan pemahaman yang jelas terhadap tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

SMA Negeri Sumatera Selatan memiliki tujuan utama untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, dengan sasaran peserta didik dari keluarga pra sejahtera yang berprestasi di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2) Transmisi

Transmisi komunikasi dalam implementasi program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan terlihat dari beragamnya saluran komunikasi yang digunakan oleh sekolah dan instansi terkait dalam menyosialisasikan program, baik melalui media digital, komunikasi langsung, maupun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Transmisi komunikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan media sosial, YouTube, serta publikasi di media massa untuk menyebarkan informasi mengenai program sekolah gratis dan berbagai prestasi siswa untuk memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat nasional dan internasional.

Sekolah melibatkan siswa, guru, dan staf dalam kegiatan sosialisasi ke berbagai daerah, khususnya kabupaten/kota yang jumlah pendaftarnya relatif rendah. Di tingkat internal sekolah, transmisi komunikasi juga didukung oleh penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan, evaluasi, dan koordinasi rutin antar unsur pelaksana.

3) Konsistensi

Edwards III dalam Setyawan (2017) komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan penting untuk memastikan

pemahaman yang sama di kalangan pelaksana dan sasaran sehingga konsistensi komunikasi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun dalam perjalanannya terdapat perubahan kebijakan dan dinamika pemerintahan. Informasi terkait tujuan dan arah program tetap disampaikan secara berkesinambungan oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah kepada seluruh pihak yang terlibat yang tetap mengacu pada visi awal program, yaitu memberikan akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

b. Sumber Daya

Edward III dalam Subarsono (2011:90) mengemukakan bahwa unsur sumber daya mencakup empat komponen utama, yakni SDM, kewenangan, anggaran, dan sarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

1) Sumber Daya Manusia

SMA Negeri Sumatera Selatan dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas, tenaga pendidik telah berada pada kondisi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis.

Jumlah peserta didik di SMA Negeri Sumatera Selatan relatif tidak terlalu besar, yaitu sekitar 360 siswa, yang didukung oleh kurang lebih 38 orang guru.

Komposisi tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Mayoritas guru telah memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu sesuai dengan ketentuan sertifikasi guru. Sementara itu, guru yang belum tersertifikasi saat ini sedang mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik melalui skema PPG Guru Tertentu maupun PPG *Piloting*.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu rutin menyelenggarakan berbagai pelatihan dan *workshop* bagi guru, baik yang bersifat internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal. Upaya peningkatan kompetensi guru juga diperkuat melalui pelatihan 14 bahasa Inggris dan pelatihan pendekatan pembelajaran *deep learning*. Hal ini bertujuan untuk mendukung implementasi kurikulum nasional dan kurikulum internasional *Cambridge* yang diterapkan di SMA Negeri Sumatera Selatan.

2) Anggaran

Anggaran utama penyelenggaraan SMA Negeri Sumatera Selatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Informan menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan setiap tahun cukup besar

dan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional utama sekolah dan kebutuhan peserta didik.

Keberlanjutan pendanaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah, tetapi juga oleh komitmen politik pemerintah daerah dalam menempatkan pendidikan gratis sebagai bagian dari kebijakan strategis pengentasan kemiskinan. Selain bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan, SMA Negeri Sumatera Selatan juga menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Namun, kontribusi Dana BOS relatif kecil dibandingkan dengan total kebutuhan anggaran sekolah. Hal ini disebabkan oleh jumlah peserta didik yang terbatas.

3) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana secara umum dalam keadaan baik dan terus mengalami peningkatan yang memiliki peran strategis karena sekolah tidak hanya menyediakan layanan pendidikan formal, tetapi juga layanan asrama dan kebutuhan pendukung lainnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Dengan adanya fasilitas asrama yang memadai, peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal tanpa terbebani oleh masalah tempat tinggal dan biaya tambahan. Selain

fasilitas ruang kelas dan asrama, sarana penunjang pembelajaran berupa laboratorium juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sekolah. peralatan laboratorium yang dimiliki sekolah tergolong modern dan mampu mendukung kegiatan pembelajaran secara optimal.

4) Wewenang

Kewenangan terlihat dari adanya pembagian wewenang yang jelas antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan pihak sekolah.

Pembagian wewenang tersebut terutama terlihat pada aspek penganggaran, pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan program. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan utama dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan program pendidikan gratis. Seluruh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pembiayaan program dan pengadaan sarana prasarana, berada di bawah kendali Dinas Pendidikan. Pihak sekolah memiliki kewenangan terbatas pada tahap perencanaan operasional, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun rincian usulan program.

c. Disposisi

Edward III dalam Fitrianingrum (2020) menyatakan bahwa disposisi mencerminkan kemauan, komitmen, dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

1) Sikap & Komitmen

Di SMA Negeri Sumatera Selatan, sikap dan komitmen aparatur sekolah. Komitmen ini terlihat melalui konsistensi kepemimpinan, pengelolaan kurikulum yang efektif, serta dedikasi tenaga pendidik dalam menjalankan tanggung jawab secara profesional dan berkesinambungan.

Konsistensi pelaksanaan program pendidikan gratis dijaga melalui upaya menjaga kinerja institusi dan citra sekolah yang positif di mata publik dan pemerintah. Selain itu, sekolah secara konsisten mengembangkan program pembentukan karakter dan pola hidup sehat, serta mendorong terciptanya perilaku positif dari seluruh warga sekolah. Capaian dan praktik baik tersebut kemudian dikomunikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik, sehingga membangun kepercayaan pemerintah dan masyarakat terhadap keberlanjutan program pendidikan gratis.

Sekolah juga membentuk Tim Pengembang Kurikulum yang secara

sistematis menyusun, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan kurikulum.

Pada tingkat pelaksana, sikap dan komitmen guru menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan peran tidak hanya sebagai pendidik akademik, tetapi juga sebagai pendamping dan figur pengganti orang tua bagi peserta didik yang tinggal di asrama. SMA Negeri Sumatera Selatan berupaya menjadi sekolah rujukan dan inspiratif bagi pengembangan model pendidikan lain, seperti sekolah rakyat dan sekolah berasrama, melalui penerapan praktik-praktik baik dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas program dimulai sejak tahap awal pelaksanaan, yaitu pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sekolah menerapkan sistem seleksi yang ketat dan berlapis sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif dalam memastikan bahwa program pendidikan gratis benar-benar diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Pelaksanaan *home visit* dipandang sebagai instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas juga diterapkan dalam pengelolaan program dan keuangan sekolah. Sekolah juga telah terdaftar sebagai badan publik pada Komisi

Informasi melalui Kominfo sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi. Laporan keuangan juga disampaikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Sistem Pelaporan Keuangan (SPG) dan Dapodik.

Seluruh transaksi keuangan juga dilakukan melalui sistem SIPLah dengan vendor resmi yang ditetapkan pemerintah, sehingga sekolah tidak mengelola dana tunai secara langsung. Sebagai bagian dari pengawasan dan partisipasi publik, sekolah secara rutin menyampaikan laporan penggunaan anggaran dalam rapat bersama dewan guru dan pertemuan dengan orang tua peserta didik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan sebagai mekanisme kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan dan menentukan keberhasilannya.

1) SOP & Program Pendukung

Dalam program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan, struktur birokrasi terlihat melalui landasan hukum yang jelas berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2009. Perda tersebut diterbitkan sebagai payung hukum pendirian sekolah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada saat kewenangan pengelolaan sekolah menengah belum sepenuhnya berada di

tingkat provinsi. Peraturan daerah (perda) juga menjadi dasar kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Putra *Sampoerna Foundation* dalam pengelolaan awal sekolah.

Sebagai bentuk penguatan struktur birokrasi, Perda tersebut diturunkan ke dalam regulasi teknis berupa Peraturan Gubernur, yaitu Pergub Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis SMA Negeri Sumatera Selatan dan Pergub Nomor 37 Tahun 2018 yang mengatur sistem penggajian tenaga pendidik dan kependidikan. Meskipun beberapa regulasi mengalami penyesuaian akibat perubahan kebijakan, secara umum penyelenggaraan sekolah tetap berpedoman pada regulasi utama yang berlaku.

SMA Negeri Sumatera Selatan memiliki SOP tertulis yang disebut sebagai Juknis Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Juknis ini disusun dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan disahkan secara formal oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Dari sisi program pendukung, SMA Negeri Sumatera Selatan memiliki berbagai inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat keberlanjutan program, khususnya dalam mendorong peningkatan prestasi peserta didik baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Sekolah secara sistematis menyediakan wadah pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah saat ini memiliki sekitar 15 klub ekstrakurikuler yang dapat dipilih secara bebas oleh peserta didik sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Selain pengembangan nonakademik, terdapat pembinaan prestasi akademik melalui program kelas olimpiade. Program ini difokuskan pada pembinaan sembilan mata pelajaran Olimpiade Sains Nasional (OSN), serta bidang akademik lain seperti debat Bahasa Indonesia (LDBI), debat Bahasa Inggris (NSDC), dan lomba civics dalam kompetisi Empat Pilar.

Pembinaan akademik tidak hanya mengandalkan sumber daya internal sekolah, tetapi juga diperkuat melalui kolaborasi dengan tenaga ahli eksternal, seperti dosen perguruan tinggi dan mantan peraih medali olimpiade.

Untuk mendukung proses tersebut, Setiap peserta didik yang mengikuti kompetisi juga didampingi oleh pembimbing khusus yang bertugas menyusun strategi belajar, merancang target capaian, serta memantau perkembangan persiapan lomba.

Sejalan dengan itu, keunggulan sekolah juga terlihat pada penerapan kegiatan kokurikuler lintas mata pelajaran

berbasis STEM, serta berbagai program penguatan karakter dan kepemimpinan. program yang terintegrasi dengan kehidupan asrama, seperti *Leadership Camp*, *Solo Camp*, program 3L, serta pembinaan keagamaan.

2) Fragmentasi

Pelaksanaan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan melibatkan berbagai aktor birokrasi dan pemangku kepentingan yang bekerja secara terkoordinasi dengan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis disusun secara hierarkis dengan alur koordinasi yang formal dan berkelanjutan. Dinas Pendidikan berperan sebagai penentu arah kebijakan dan pengawas utama, sementara SMA Negeri Sumatera Selatan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi formal guna memastikan kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan pelaksanaan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan dapat dikategorikan sebagai *best practice* dalam kebijakan

pendidikan karena telah memenuhi indikator dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas. Program ini secara umum telah diimplementasikan dengan baik dan efektif serta didukung oleh faktor-faktor implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari aspek dampak, program ini mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Dari aspek kemitraan, keberhasilan program didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, serta berbagai stakeholder yang berperan dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan program.

Keberlanjutan program terjamin melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah dan inovasi yang dilakukan sekolah secara berkelanjutan, sementara aspek kepemimpinan menunjukkan adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dan kepemimpinan sekolah yang mampu mengelola program secara efektif dan partisipatif. Selain itu, tingkat transferabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa program ini dapat menjadi rujukan bagi institusi lain dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang serupa.

Secara keseluruhan, keberhasilan Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang didukung komunikasi yang efektif, kerjasama berbagai stakeholder, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang jelas mampu menghasilkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera, mendorong peningkatan motivasi dan prestasi belajar, serta berkontribusi pada peningkatan indikator pendidikan daerah seperti Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

SARAN

1. Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan perlu terus meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan melalui pemanfaatan media digital dan forum partisipatif serta memperkuat mekanisme umpan balik dari sekolah agar informasi pelaksanaan program lebih akurat dan responsif.
2. Pemerintah provinsi diharapkan menjaga keberlanjutan dukungan anggaran serta meningkatkan

pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, disertai koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan sarana dan prasarana sekolah.

3. Sekolah perlu mempertahankan pelaksanaan seleksi peserta didik yang objektif, transparan, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan terhadap program.
4. Evaluasi SOP secara berkala dan peningkatan koordinasi antarunit birokrasi perlu dilakukan agar pelaksanaan program tetap efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, H. (2016). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Prasojo, E., Kurniawan, T., dan Hasan, A., (2007). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen. Jakarta: Yappika.
- Prasojo, E., Kurniawan, T., & Hasan, A. (2004). Reformasi birokrasi dalam praktek: kasus di Kabupaten Jembrana. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen Resmi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan

Jurnal

Ahmad, B., & Weyai, S. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(1), 37-43.

C. Ruff, A. Matheu, M. Ruiz, P. Juica, dan MTG Marcos, "Pendidikan bebas biaya sebagai variabel baru kebijakan pembiayaan campuran dalam pendidikan tinggi di Chili dan dampaknya terhadap lintasan mahasiswa dan mobilitas sosial," *Heliyon*, vol. 9, no. 7, hlm. e17415, 2023.

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17415>

Huda, G. R. N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kota Malang: (Studi kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(6), 324-330. <http://administrasipublik.stude>

ntjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1741/579

Lidda, M. A. A., Tajuddin, M. S., & Irfan, I. (2022). Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malunda (Smpn4 Malunda) Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 80-91.

Munawaroh, N. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah Menengah Pertama Oleh Dinas Pendidikan Di Kabupaten Bandung. *Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2).

Ridho, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan (Studi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan). *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)* e-ISSN 2721-9666, 6(1), 85-93.

Rolos, M.C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, VIII(113), 1–11

Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Studi Kasus*.

Bandung: Nusa Media.

Usman, D. H., Sauri, S., & Fath, A. F. (2022). Dampak kebijakan pendidikan gratis bagi kualitas pendidikan di Pesantren Fath. Ta'dibuna: *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(4), 589–600. Diambil dari <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>